

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

**Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral**

**A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan IV Tahun 2025**

| No         | Indikator Kinerja Utama  | Satuan     | Target Tahun 2025 | Target Triwulanan 2025 | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|------------|--|------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>I</b>   | <b><i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD</i></b>   |            |                   |                        |                       |             |
| 1.1        | Indikator 1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD | Persentase | 100%              | 100%                   | 100%                  | 100%        |
| <b>II</b>  | <b><i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i></b>             |            |                   |                        |                       |             |
| 2.1        | Indikator 2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20                                       | Persentase | 80%               | 100%                   | 100%                  | 125%        |
| 2.2        | Indikator 2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)                    | Persentase | 80%               | 80%                    | 100%                  | 125%        |
| <b>III</b> | <b><i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral</i></b>                 |            |                   |                        |                       |             |
| 3.1        | Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD  | Persentase | 100%              | 100%                   | 100%                  | 100%        |
| 3.2        | Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian  | Persentase | 80%               | 80%                    | 100%                  | 125%        |

|     |  |            |          |          |      |      |
|-----|--|------------|----------|----------|------|------|
| 3.3 | Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional<br><br>Indikator 3.3 Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) | Persentase | 80%      | 80%      | 100% | 125% |
| IV  | <b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral</b>   |            |          |          |      |      |
| 4.1 | Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral   | Indeks     | 3 dari 4 | 3 dari 4 | 3    | 100% |
| IV  | <b>Sasaran Program 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional</b>   |            |          |          |      |      |
| 5.1 | Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral   | Persentase | 85%      | 85%      | 85%  | 100% |

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1

### Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD, di mana proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan (*roadmap*).

Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktik Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen *Initial Memorandum* yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD**

**Latar Belakang**

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD dalam mengawal proses awal akses Indonesia keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan capaian pelaksanaan penilaian mandiri oleh kementerian/lembaga nasional terkait, penyusunan dokumen Initial Memorandum, serta penyampaiannya kepada Sekretariat OECD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban substansial dalam tahapan akses.

Initial Memorandum merupakan penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan seluruh instrumen hukum OECD yang berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggota. Instrumen hukum tersebut mencakup Keputusan, Rekomendasi, dan Pernyataan Substantif, serta Perjanjian atau Kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka kerja OECD. Penilaian mandiri ini harus mencakup instrumen hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan proses akses, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertindak sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Berdasarkan Peta Jalan Akses dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Proses ini mencakup pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga, pengumpulan dan konsolidasi hasil asesmen, penyusunan dokumen Initial Memorandum, hingga pengorganisasian penyampaiannya kepada Sekretariat OECD.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah IM yang disampaikan ke Sekretariat OECD}}{\text{Total IM}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan, dan penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD telah tercapai sepenuhnya, dengan realisasi kinerja mencapai 100% dari target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Dokumen Initial Memorandum telah disampaikan kepada Sekretariat OECD sesuai dengan komitmen yang ditetapkan, serta dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pendukung pasca penyampaian dokumen dalam rangka persiapan tahapan technical review dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama   | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja            |
|---|------------|--------|-----------|----------------------|
| IKU-1.1<br>Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD | Persentase | 100%   | 100%      | 100 %<br>(Memuaskan) |

Dengan demikian, capaian kinerja Indikator 1.1 pada Triwulan IV Tahun 2025 berada pada kategori tercapai, sekaligus mencerminkan keberlanjutan proses akses Indonesia ke OECD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%.

### Tindak Lanjut Proses Akses OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review

Sebagai tindak lanjut pasca penyampaian Dokumen Initial Memorandum, pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung persiapan Indonesia dalam menghadapi tahapan technical review OECD. Kegiatan tersebut antara lain meliputi rapat koordinasi dengan OECD Accession Coordinator guna membahas perkembangan dan mekanisme tahapan lanjutan akses Indonesia ke

OECD. Selain itu, dilakukan pula diskusi *technical review* bersama Sekretaris Jenderal OECD sebagai bagian dari penguatan komunikasi teknis dan klarifikasi substansi kebijakan yang relevan dengan instrumen OECD.

→ **Diskusi Pelaksanaan *Technical Review* Akses OECD Indonesia bersama Sekretariat OECD**

Pada 12 Desember 2025, dalam rangkaian kunjungan *Deputy Secretary General* dan Delegasi OECD, telah diselenggarakan Diskusi Pelaksanaan *Technical Review* Akses OECD Indonesia oleh Sekretariat Tim Nasional OECD yang dihadiri oleh Koordinator Akses OECD dan Delegasi OECD serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama Kementerian/Lembaga Anggota Tim Nasional OECD, antara lain:

- OECD tidak menentukan tenggat waktu dalam penyelesaian proses akses suatu negara. Kecepatan penyelesaian proses akses suatu negara dikembalikan kepada negara akses dalam menyediakan informasi dan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang diperlukan dalam menjembatani *policy gaps* sebagaimana rekomendasi yang akan dihasilkan dalam proses *technical review*.
- Proses *technical review* dilakukan secara terdesentralisasi dan menyesuaikan substansi serta kebijakan dari masing-masing direktorat/komite OECD terkait.
- Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Bidang dapat berkoordinasi dengan OECD dan anggota bidang dalam pelaksanaan *technical review*. Hal ini terutama agar terdapat sinergi proses koordinasi di tingkat nasional dengan agenda pertemuan tingkat komite OECD yang telah terjadwal setiap tahun.
- Sekretariat OECD sedang berkoordinasi dengan direktorat/komite OECD terkait dalam menyusun *timeline technical review* yang akan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Bidang.
- Selain dilakukan oleh komite OECD terkait, proses *technical review* pada beberapa bidang akan dilakukan oleh Sekretariat OECD dengan tahapan dan *timeline* yang berbeda dari bidang lain, yakni: (i) Pertumbuhan Inklusif; (ii) Kepatutan; (iii) Transportasi Laut; (iv) Bantuan Pembangunan; (v) Pembangunan Ekonomi; (vi) Pariwisata; (vii) Tenaga Nuklir; dan (viii) Perdagangan pada sektor SMEs.

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan IV adalah sebagai berikut:

**1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD**

| No | Rencana Aksi TW IV   | Status     | Keterangan<br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)   |
|----|--|------------|--|
| 1  | Tindak Lanjut Proses Aksesi OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review | Terlaksana | Setelah penyampaian Dokumen Initial Memorandum, proses aksesi masuk pada tahapan <i>technical review</i> . Tahap ini dimulai dengan distribusi kuesioner kepada K/L Anggota Tim Nasional OECD yang dilanjutkan dengan kunjungan <i>fact-finding mission</i> ke Indonesia dan penyusunan studi independen untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan regulasi Indonesia yang memerlukan proses <i>finetuning</i> lebih lanjut. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Finalisasi Pengisian Kuisisioner Aksesi OECD Bidang Lingkungan Hidup tanggal 27 Oktober 2025
2. Rapat Koordinasi dengan OECD Accession Coordinator pada tanggal 31 Oktober 2025
3. Rapat Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RPerpres) dalam Mendukung Proses Aksesi Indonesia ke dalam OECD tanggal 5 November 2025
4. Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Teknis Pengisian Kuesioner Tahapan Reviu Teknis Aksesi OECD pada Komite Bidang Perdagangan tanggal 24 November 2025
5. Rapat Persiapan Pertemuan OECD Accession Mission bidang Environment Policy and Waste tanggal 1 Desember 2025
6. Workshop Reviu Teknis dan Strategi Akselerasi Aksesi Indonesia ke OECD pada Komite Bidang Perdagangan tanggal 5 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya

dilakukan secara virtual dan memanfaatkan ruang rapat di kantor sehingga anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp60.700.000

## 2

### **Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi,

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20
2. Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC).

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20**

##### **Latar Belakang**

Sebagai forum multilateral yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Uni Eropa, G20 didedikasikan untuk menata kerja sama ekonomi dan keuangan global. Forum G20 memiliki peran krusial dalam merespons krisis berskala global, baik krisis keuangan maupun moneter, hingga krisis lainnya, seperti krisis kesehatan, pangan, dan energi, agar tidak menimbulkan dampak lebih buruk bagi perekonomian global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai pengampu koordinasi kebijakan ekonomi lintas kementerian/lembaga, memiliki mandat untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia di Forum Sherpa G20 menghasilkan komitmen yang konkret, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis nasional. Tingkat efektivitas kerja sama ekonomi multilateral yang diukur melalui jumlah komitmen yang dihasilkan dan diimplementasikan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana peran aktif Indonesia berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas kerja sama ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 diukur berdasarkan jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati. kesepakatan dalam Forum Multilateral tersebut merupakan upaya mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar negara. Adapun ruang lingkup dari sasaran strategis ini adalah tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi multilateral dimana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator dalam forum tersebut.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum Sherpa G20 Tahun 2025 sebanyak 5 Komitmen sebagai berikut:

1. Pertemuan Sherpa ke-1 Presidensi G20 Afrika Selatan
2. Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Presidensi Afrika Selatan;
3. Pertemuan Sherpa G20 ke-3 Presidensi Afrika Selatan;
4. Pertemuan Sherpa G20 ke-4 Presidensi Afrika Selatan

## 5. KTT G20 Presidensi Afrika Selatan

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20}}{\text{Total Forum Sherpa G20}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum Sherpa G20 telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan IV, dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama   | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-2.1<br>Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 | Persentase | 80%    | 100%      | 100%      |

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 sudah tercapai sesuai target IKU yang ditetapkan pada Triwulan IV, yaitu sebesar 100%, yang dicapai melalui:

#### Pertemuan Sherpa G20 ke-4

Pertemuan Sherpa G20 ke-4 telah dilaksanakan pada tanggal 16-19 November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Fokus pertemuan tersebut adalah menyusun *draft Leaders' Declaration* yang akan dibahas pada KTT G20. Draft deklarasi berfokus pada empat prioritas utama agenda pembangunan global G20 Presidensi Afrika Selatan. Sebelum pelaksanaan Sherpa G20 ke-4, telah dilakukan rapat intersesi sebanyak 4 kali secara daring untuk menyusun *Zero Draft Leaders' Declaration* yang nantinya akan dibahas pada KTT G20.

#### KTT G20 Presidensi Afrika Selatan

KTT G20 Presidensi Afrika Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Afrika Selatan menjadi negara terakhir dalam siklus pertama perputaran keketuaan Forum G20. KTT G20 dihadiri

Leaders G20, 42 negara undangan, serta 29 organisasi internasional dan regional. Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota G20 yang tidak hadir.

Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 mengusung tema "Solidarity, Equality, Sustainability" sebagai pilar utama *inclusive growth*. Dalam KTT G20 dihasilkan konsensus berupa *G20 Leaders' Declaration* yang menekankan nilai Ubuntu, yaitu keterhubungan antarbangsa dan pentingnya solidaritas global.

Fokus utama *Leaders' Declaration* yaitu Perdamaian dan Tata Kelola Global; Ketahanan Bencana; Keberlanjutan Utang; Transisi Energi Berkeadilan; Mineral Kritis; Pertumbuhan Inklusif dan Industrialisasi; Ketahanan Pangan; AI dan Teknologi; Kemitraan untuk Afrika; *Finance Track*; Perpajakan Internasional; Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim; Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda; Kesehatan Global; Pendidikan, Digitalisasi, dan Kebudayaan; Pemberantasan Korupsi, serta Migrasi dan Pariwisata.

Selain itu, KTT G20 juga mengangkat inisiatif "The G20 @20" (G20 dalam 20 tahun pertama) sebagai Laporan Evaluasi G20 sejak pertama berdiri dan rekomendasi keberlanjutan G20 ke depan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

| <b>2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20</b> |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| <b>No</b>   | <b>Rencana Aksi TW IV</b>  | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b><br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)  |
| 1.  | Pertemuan Sherpa ke-4 G20  | Terlaksana    | Sherpa G20 ke-4 telah dilaksanakan pada tanggal 16-19 November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pertemuan ini membahas <i>draft Johannesburg Leaders' Declaration</i> |
| 2.  | Komitmen pada Leaders' Declaration G20 PRESIDENSI Afrika Selatan | Terlaksana    | <i>G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration</i> telah tercapai pada KTT G20 yang  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2025. Konsensus tersebut memuat komitmen yang menegaskan dukungan G20 kepada negara berkembang, khususnya Afrika |
|--|--|--|---|

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Bilateral dengan Sherpa Singapura pada tanggal 3 Oktober 2025
2. Pertemuan Bilateral dengan Sous Sherpa Canada pada tanggal 14 Oktober
3. Pertemuan Intersesi Sherpa G20 ke-1 pada tanggal 29 Oktober
4. Pertemuan Bilateral dengan Sherpa EU pada tanggal 30 Oktober
5. Pertemuan Intersesi Sherpa G20 ke-2 pada tanggal 5 November
6. Pertemuan Intersesi Sherpa G20 ke-3 pada tanggal 10 November
7. Pertemuan Bilateral dengan Sherpa Kanada pada tanggal 7 November
8. Pertemuan Intersesi Sherpa G20 ke-4 pada tanggal 11 November
9. Pertemuan dengan Sous Sherpa IsDB pada tanggal 26 November

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pertemuan Intersesi Sherpa G20 dihadiri secara virtual, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp72.430.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk menghadiri Pertemuan Sherpa G20 ke-4, KTT G20 Presidensi Afrika Selatan, dan Pertemuan Sherpa G20 ke-1 Presidensi Amerika Serikat yang diselenggarakan secara luring pada akhir Triwulan IV 2025.

**2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)**

**Latar Belakang**

Dalam bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pembangunan berkelanjutan, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral melaksanakan tugas koordinasi dan sinkronisasi berbagai inisiatif kerja sama yang mencakup pembiayaan pembangunan dan pembiayaan perubahan iklim. Prioritas utama dalam bidang ini difokuskan pada kerja sama *Joint Crediting Mechanism* (JCM) dan *Asia Zero Emission Community* (AZEC).

Dalam rangka memitigasi perubahan iklim, Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama bilateral dalam skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM) dengan menggunakan fasilitasi teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dari

Pemerintah Jepang. Kerja sama JCM telah diinisiasi sejak tahun 2013 dan disepakati untuk diperpanjang hingga tahun 2030. Implementasi JCM dilakukan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait. Kerja sama JCM bertujuan untuk mendorong implementasi teknologi rendah karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, kerja sama ini juga memfasilitasi penyebaran teknologi, produk, sistem, layanan, dan infrastruktur rendah karbon, serta meningkatkan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Jepang menetapkan kebijakan *Green Transformation (GX)* yang bertujuan mendukung transformasi sektor industri yang menggunakan energi bersih. Sebagai bagian kerja sama internasional dalam kerangka GX, Pemerintah Jepang mengumumkan inisiatif AZEC pada bulan Januari 2022 yang melibatkan negara di Asia untuk menjamin ketahanan energi dan mendorong dekarbonisasi. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral ditugaskan menjadi Sekretaris Tim Pelaksana Satuan Tugas AZEC Indonesia. Sebagai sekretaris, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral berperan untuk menjalankan tugas kesekretariatan dalam mendukung pengarah, tim pelaksana, dan kelompok ahli dalam mewakili Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi kerja sama AZEC dengan Jepang.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Implementasi Proyek JCM dan AZEC}}{\text{Total Implementasi Proyek JCM dan AZEC}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum JCM dan AZEC telah mencapai target yang ditetapkan, dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja           |
|--|------------|--------|-----------|---------------------|
| IKU-2.2<br><i>Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission</i> | Persentase | 80%    | 100%      | 125%<br>(Memuaskan) |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| Community<br>(AZEC) |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek JCM dan AZEC, sudah tercapai sebesar, melalui komitmen-komitmen sebagai berikut:

### **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 AZEC 2025**

Pada 26 Oktober 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia telah diselenggarakan pertemuan KTT ke-3 AZEC di sela-sela rangkaian KTT ASEAN 2025. Mewakili Presiden Republik Indonesia, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KTT ke-3 AZEC dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Malaysia.

*AZEC Leaders' Joint Statement* menegaskan kembali komitmen negara mitra AZEC untuk mencapai carbon neutrality dan net-zero emissions melalui jalur yang beragam dan praktis (one goal, various pathways) yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara mitra. Dokumen ini menekankan prinsip AZEC "triple breakthrough", yaitu mengatasi perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memastikan keamanan energi. Dokumen ini menyoroti pula urgensi pengurangan emisi gas rumah kaca secara ambisius sesuai dengan target 1,5°C. Selain itu, disepakati pula pelaksanaan percepatan Action Plan for the Next Decade, mengakui progres yang telah dicapai dan menugaskan para menteri terkait negara mitra AZEC untuk terus memperkuat kerja sama menuju dekarbonisasi kawasan Indo-Pasifik yang tangguh dan berkelanjutan.

Terdapat 118 Kesepakatan kerja sama proyek (MoU) antara Jepang dengan seluruh negara Mitra AZEC. Tercatat 21 MoU proyek kerja sama antara Jepang dengan Indonesia dalam lingkup AZEC di antaranya: Loan Agreement of Project Financing for the Muara Laboh Geothermal Power Expansion Project (From JBIC USD 138 Million and the rest are from Mizuho Bank, MUFG Bank, SMBC and The Hyakugo Bank, Total USD 370 Million); Cooperation among PT. PLN (Persero), Chubu Electric Power Co., Inc., and the Okinawa Electric Power Company, Inc regarding the de-dieselization in Indonesia; dan MoU between PT. PLN (Persero) and Chubu Electric Power Grid regarding capacity building in transmission and distribution area.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

#### **2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)**

| No | Rencana Aksi TW IV                          | Status | Keterangan<br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)   |
|----|---|--------|--|
| 1. | Keputusan Rapat Joint Committee (JC) JC     | 100%   | JCM Electronic Decision telah ditetapkan pada tanggal 22 desember 2025 berdasarkan paragraf 15 (b) "JCM Rules of Procedures for the Joint Committee" |
| 2. | Pelaksanaan AZEC Expert Group Meeting (EGM) | 100%   | Menindaklanjuti AZEC EGM ke-8 pada bulan juli lalu, telah dihadiri KTT AZEC di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Oktober 2025.                          |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan fasilitas ruang rapat di kantor dan penggunaan media *zoom* dengan efisiensi sebesar 45.780.000.

### 3

#### Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

### 3.1 Persentase Penyelesaian

#### Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Aksesi Indonesia ke OECD

### Latar Belakang

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan berupa Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Aksesi Indonesia ke OECD dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait, kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Aksesi Indonesia ke OECD diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

#### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

#### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan

melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja           |
|--|------------|--------|-----------|---------------------|
| IKU-3.1<br>Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD | Persentase | 100%   | 100%      | 100%<br>(Memuaskan) |

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD telah memenuhi target sebesar 100% dari Target tahunan yang telah ditetapkan.

### Bimbingan Teknis Pengisian Kuisisioner OECD

Bimbingan teknis dilaksanakan secara hybrid selama dua hari berturut-turut, 13-14 Oktober 2025. Kegiatan ini dibagi menjadi empat sesi dan peserta yang berbeda. Adapun jumlah Kementerian/Lembaga yang diundang Adalah 29 Kementerian/Lembaga dalam berbagai bidang Tim Nasional OECD. Pemateri berasal dari Cartenz yang merupakan pengembang platform INA OECD. Setiap sesi diberikan alokasi waktu selama tiga jam termasuk sesi tanya jawab dari peserta.

Pada sesi pembukaan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, disampaikan mengenai perkembangan akses Indonesia ke OECD, di mana saat ini Indonesia berada dalam tahap peninjauan teknis (*technical review*). Pada tahap ini diawali dengan pengumpulan informasi yang dibagi lagi menjadi tiga kegiatan yang berbeda yaitu pengisian kuisisioner, fact-finding mission hingga studi independent. Diestimasikan bahwa OECD akan mulai menyebarkan kuisisioner mulai TW III 2025 dan sudah diawali dengan bidang Environment Policy kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kuisisioner akan bersifat

committee country specific yang akan berbasis pada prinsip-prinsip utama dalam Peta Jalan Akses Indonesia dan dokumen IM Indonesia.

Kementerian/Lembaga dalam Tim Nasional OECD ditargetkan untuk dapat menyampaikan tanggapan dari kuesioner dalam satu hingga dua bulan sejak diterimanya kuesioner. Setelah kuesioner selesai diisi oleh Indonesia dan diterima OECD, OECD akan menjadwalkan fact finding missions ke Jakarta. Penyusunan tahapan dimulainya Technical Review dari Bidang-Bidang Tim Nasional OECD yang ada, berdasarkan beberapa parameter, Kebutuhan penyesuaian instrumen hukum di tingkat nasional, khususnya undang-undang yang memerlukan pelibatan DPR; Tingkat kompleksitas instrumen hukum dan sektor; Adanya instrumen lintas sektor dan Kesiapan K/L dalam melaksanakan technical review untuk memungkinkan quick-wins.

Pengumpulan daftar narahubung dari K/L Tim Nasional OECD sekaligus menyampaikan narahubung dari OECD kepada setiap K/L. Pengidentifikasi dukungan teknis yang dapat diberikan negara anggota OECD untuk proses akses Indonesia. Pemutakhirkan platform INA-OECD untuk memudahkan tracking progress pengisian kuisisioner. Dijelaskan juga mengenai platform INA OECD yang merupakan platform terpusat untuk memfasilitasi akses Indonesia ke OECD melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder. Platform INA OECD memiliki tiga fungsi utama yaitu manajemen dokumen dan kolaborasi, aktivitas dan manajemen tugas, dan update perkembangan dan dashboard.

INA OECD sudah dikembangkan dengan penambahan fitur OECD contact list dan information gathering. Pengisian kuesioner melalui platform INA OECD dilakukan secara online dengan template kuesioner yang sudah disesuaikan dengan OECD. Koordinator bidang dapat mengoordinasikan pengisian kuesioner sesuai dengan relevansi substansi K/L atau unit kerja anggota bidang. K/L dapat memantau progress pengisian kuesioner melalui dashboard. Materi yang disampaikan oleh Cartenz adalah langkah-langkah setelah submisi IM yang secara business process dalam INA OECD terdapat tujuh langkah. Langkah pertama adalah pengumpulan informasi dilanjutkan dengan laporan atas pengumpulan informasi, diskusi di tingkat komite, penyampaian chair letter, implementasi proses reformasi oleh Indonesia, formal opinion dan terakhir submisi ke dewan OECD.

Bimtek berfokus pada cara pengisian kuesioner melalui laman INA OECD. Setiap Kementerian/Lembaga anggota bidang tim nasional OECD diharapkan dapat mengisi kuesioner secara online. Koordinator bidang berperan dalam mengkompilasi dan mengoordinasikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan kuesioner. Apabila memerlukan dukungan dari unit kerja atau K/L lebih dari satu, maka Koordinator bidang agar memfasilitasi dan mengakomodir serta bertanggungjawab untuk memasukan jawaban final ke dalam laman INA OECD.

### **Kuliah Tamu “Perkembangan dan Manfaat Akses OECD Indonesia”**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Tim Nasional OECD bersama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyelenggarakan *Guest*

Lecture bertema *Progress and Benefits of Indonesia's Accession to the OECD* bertempat di Auditorium Magister Manajemen, Universitas Indonesia pada 12 Desember 2025. Forum diskusi akademik merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kualitas kebijakan Indonesia melalui pendekatan berbasis bukti dan kajian ilmiah. Kolaborasi yang terjalin menegaskan bahwa dunia akademik memiliki peran strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai proses aksesi OECD. sebagai bagian dari reformasi struktural yang tengah ditempuh Pemerintah.

Sebagai salah satu fokus dalam reformasi bidang sosial, OECD mendatangkan Direktur Pendidikan dan Kompetensi OECD Andreas Schleicher. Direktur Andreas menjelaskan bahwa hasil PISA 2022 masih menunjukkan adanya tantangan bagi Indonesia dalam mencapai kompetensi dasar yang kuat, namun sekaligus memberikan peluang reformasi yang signifikan. Menurutnya, setiap peningkatan kemampuan dasar di tingkat siswa, membawa konsekuensi ekonomi jangka panjang yang sangat besar bagi suatu negara. Penyelarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, peningkatan kapasitas guru, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, serta perhatian terhadap implikasi digitalisasi, termasuk meningkatnya otomatisasi dan perubahan pola pekerjaan adalah poin-poin penting dalam transformasi di dunia pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Aksesi OECD Gita Kothari memaparkan arti penting dalam komunikasi publik. Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu tahu proses aksesi OECD akan menghasilkan reformasi besar-besaran dan akan berdampak langsung dalam semua lini kehidupan, tidak hanya ekonomi namun sosial, pendidikan dan juga kesehatan. Proses aksesi dapat menjadi jembatan penghubung Indonesia terhadap standar global yang dapat diadopsi untuk mendukung prioritas pemerintah keluar dari *Middle-Income Trap*.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

| <b>3.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Aksesi Indonesia ke OECD</b> |  |               |   |
|---|--|---------------|---|
| <b>No</b>   | <b>Rencana Aksi TW IV</b>                                    | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b><br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb) |
| 1.  | Monitoring Dokumen Initial Memorandum yang telah disampaikan | Terlaksana    | Setelah penyampaian Dokumen IM, dilanjutkan dengan tahapan <i>technical review</i> . Settimnas OECD             |

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
|    | kepada Sekretariat Nasional OECD  |            | telah berkoordinasi dengan K/L agar menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk penyiapan dokumen pendukung yang menjadi acuan dalam validasi dokumen IM.  |
| 2. | Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Technical Review oleh Sekretariat OECD | Terlaksana | Pada 12 Desember 2025, dalam rangkaian kunjungan <i>Deputy Secretary General</i> dan Delegasi OECD, telah diselenggarakan Diskusi Pelaksanaan <i>Technical Review</i> Akses OECD Indonesia oleh Sekretariat Tim Nasional OECD yang dihadiri oleh Koordinator Akses OECD dan Delegasi OECD serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Weekly Meeting INA-OECD yang dilakukan rutin setiap minggu. Pertemuan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis dengan Prospera dan Developer (PT Cartenz) yang mengelola platform INA-OECD.
2. Workshop OECD Bidang Investasi Serta Finansial dan Tata Kelola Perusahaan, 1-2 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan ruang rapat di kantor dan penyelenggaraan rapat secara virtual.

### 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk

#### Latar Belakang

Proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait, kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

## **Kepentingan Nasional**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

### **Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting).

### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 100\%$$

## **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|--|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-3.2<br>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional | Persentase | 80%    | 100%      | 125%      |

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional telah memenuhi target TW IV sebesar 100% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 80%.

### **Tersepakatinya Leaders' Declaration pada KTT G20**

Dalam pertemuan KTT G20 Presidensi Afrika Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2025 di Johannesburg, para pemimpin G20 menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama multilateral dalam menghadapi ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan meningkatnya ketimpangan global. Pertemuan pertama G20 di Afrika ini menekankan nilai Ubuntu, yaitu keterhubungan antarbangsa dan pentingnya solidaritas global.

Komitmen pada Leaders' Declaration G20 adalah sebagai berikut:

1. Perdamaian dan Tata Kelola Global  
G20 menegaskan komitmen pada hukum internasional, Piagam PBB, penyelesaian damai sengketa, dan perlindungan warga sipil; mengecam terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil; mendukung upaya perdamaian di Sudan, DRC, Palestina, Ukraina, dan konflik lainnya; serta mendorong reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar lebih representatif dan responsif.
2. Ketahanan Bencana  
G20 menyambut prinsip-prinsip investasi untuk pengurangan risiko bencana (DRR) dan penggunaan mekanisme pendanaan ex-ante termasuk asuransi parametris dan risk pools.
3. Pengelolaan Pinjaman Berkelanjutan

G20 mendukung implementasi Common Framework, transparansi utang, dan inovasi seperti *debt-for-climate/development swaps*.

4. Transisi Energi Berkeadilan

G20 mendukung peningkatan 3x kapasitas energi terbarukan dan percepatan efisiensi energi global, menekankan pembiayaan terjangkau, teknologi netral, dan investasi pada infrastruktur energi bersih dan energi untuk memasak (*clean cooking*); serta mendukung program Mission 300 untuk elektrifikasi 300 juta masyarakat Afrika pada 2030.

5. Mineral Kritis

G20 meluncurkan Critical Minerals Framework untuk memastikan rantai pasok berkelanjutan, transparan, dan mendorong hilirisasi di negara produsen.

6. Pertumbuhan Inklusif dan Industrialisasi

Mendukung prinsip kebijakan industri G20, kewirausahaan, UMKM, dan inovasi teknologi untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan.

7. Ketahanan Pangan

G20 menegaskan komitmen pada sistem pangan yang tangguh, perdagangan yang terbuka dan tidak diskriminatif, penguatan kapasitas pertanian Afrika, serta mendukung Ubuntu Approaches on Food Security dan inisiatif CAADP serta AfCFTA.

8. Kecerdasan Buatan dan Teknologi

Menekankan AI yang aman, transparan, dan adil, mendukung *AI for Africa Initiative* serta fasilitas UNESCO TPAF untuk membantu negara menyusun kebijakan AI, serta memperluas akses ke infrastruktur komputasi dan talenta AI di Afrika.

9. Kemitraan untuk Afrika

Memperkuat Compact with Africa fase kedua (2025–2033) serta mendukung industrialisasi Afrika, integrasi rantai pasok global, dan investasi infrastruktur.

10. Finance Track

Menyoroti ketidakpastian ekonomi global, reformasi struktural, dan pentingnya stabilitas keuangan; mendukung reformasi IMF dan MDB, peningkatan kuota IMF, serta representasi Afrika melalui kursi ke-25; menegakkan standar Basel III, memperkuat pengawasan risiko NBF1, dan mengatasi risiko terkait aset kripto; serta menekankan inklusi keuangan dan dukungan pembiayaan UMKM.

11. Perpajakan Internasional

G20 terus mencari solusi seimbang terkait *Pillar Two* dan digitalisasi ekonomi, serta mendukung kerangka kerja PBB untuk kerja sama pajak internasional dan peningkatan kapasitas perpajakan negara berkembang.

12. Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Mendorong *just transition*, adaptasi, early warning systems, dan pendanaan iklim yang lebih besar; menyambut *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF) untuk konservasi hutan tropis; memperkuat aksi terhadap degradasi lahan, kekeringan, polusi udara, dan kejahatan lingkungan.

13. Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda

Komitmen menghapus kekerasan berbasis gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan kepemimpinan, mendukung

target Nelson Mandela Bay untuk menurunkan NEET youth 5% pada 2030, dan melanjutkan upaya mengecilkan kesenjangan gender di pasar kerja (Brisbane-eThekwiini Goal).

14. Kesehatan Global  
Mendukung UHC, penguatan sistem kesehatan, dan PPPR; serta menyambut Perjanjian Pandemi WHO dan replenishment *Global Fund*.
15. Pendidikan, Digitalisasi, dan Kebudayaan  
Memperkuat infrastruktur digital, konektivitas universal, dan pengembangan tenaga pendidik, serta mendukung pengakuan kualifikasi lintas negara dan dialog mengenai pengembalian artefak budaya.
16. Pemberantasan Korupsi  
Komitmen pada standar UNCAC, perlindungan pelapor, dan kerja sama internasional dalam pemulihan aset
17. Migrasi dan Pariwisata  
Mendukung migrasi aman dan teratur serta perlindungan hak-hak migran, serta mendorong keberlanjutan pariwisata, investasi, dan konektivitas penerbangan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

| <b>3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional</b> |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| <b>No</b>  | <b>Rencana Aksi TW IV</b>                 | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b><br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)  |
| 1.   | Rapat Persiapan Pertemuan Sherpa ke-4 G20 | Terlaksana    | Telah dilakukan pada tanggal 3 November secara daring bersama kementerian/lembaga teknis untuk membahas masukan terhadap <i>zero draft Leaders' Declaration</i> , laporan perkembangan/hasil pertemuan tingkat |

|    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
|    |  |            | <i>Working Groups, task force, dan Menteri yang telah dilaksanakan</i>  |
| 2. | Komitmen pada Leaders' Declaration G20 Presidensi Afrika Selatan                         | Terlaksana | <i>G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration</i> telah tercapai pada KTT G20 yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2025. Konsensus tersebut memuat komitmen yang menegaskan dukungan G20 kepada negara berkembang, khususnya Afrika   |
| 3. | Monitoring kesesuaian Komitmen pada Leaders' Declaration G20 dengan Kepentingan Nasional | Terlaksana | Penyesuaian <i>Leaders' Declaration</i> dengan kepentingan nasional telah dilakukan sejak pertemuan Intersesi secara daring, dimana negara anggota G20 mendiskusikan <i>Zero Draft Leaders' Declaration G20</i> . Selain itu, setelah KTT G20, dilakukan diseminasi hasil-hasil KTT G20 secara <i>online</i> untuk monitoring kesesuaian <i>Leaders' Declaration</i> yang telah disepakati pada KTT G20 |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Persiapan Sherpa ke-4 dan KTT G20 pada tanggal 3

November

2. Media Briefing Perkembangan G20 pada tanggal 13 November
3. Rapat Koordinasi Pertemuan Sherpa ke-1 Presidensi G20 Amerika Serikat dan Diseminasi Hasil-Hasil KTT G20 pada tanggal 11 Desember

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan rapat yang dilakukan melalui zoom, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp20.010.000.

**3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)**

**Latar Belakang**

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan berupa Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait, kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Jumlah\ Dokumen\ yang\ dihasilkan}{Jumlah\ Dokumen\ yang\ ditargetkan} \times 100\%$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

| Indikator Kinerja Utama   | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja           |
|---|------------|--------|-----------|---------------------|
| IKU-3.3<br>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism | Persentase | 80%    | 100%      | 125%<br>(Memuaskan) |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| (JCM) dan Asia<br>Zero Emission<br>Community<br>(AZEC) |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC telah memenuhi target TW 4 sebesar 100% dengan capaian kinerja 125%.

### **Rooftop Solar Power Project to Pharmaceutical Factories, Vehicle dealers, and Timber Factories**

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan dengan total kapasitas sekitar 4,2 MW yang terpasang di 13 lokasi, terdiri atas pabrik farmasi, dealer kendaraan, dan pabrik kayu. Listrik yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri (self-consumption), dan kelebihan daya dapat diekspor ke jaringan PT PLN apabila tersedia. Proyek ini juga telah terpilih sebagai JCM Model Project yang didukung oleh Ministry of the Environment Japan (MOEJ), dengan skema pembiayaan hibah hingga sekitar 50% dari nilai investasi. Melalui skema ini, terjadi alih teknologi terkait pengoperasian dan pemantauan PLTS ke seluruh lokasi proyek di Indonesia.

Dari sisi keberlanjutan, pemenuhan aspek Sustainable Development Implementation Plan (SDIP) tercermin melalui pengawasan keberlanjutan oleh TPEE terhadap operasional PLTS serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Operasi sistem dipastikan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maupun kualitas lingkungan, sehingga manfaat penurunan emisi dapat dicapai tanpa dampak negatif tambahan.

Secara umum, instalasi PLTS Rooftop di Bali, khususnya pada Location 6 hingga Location 11, diperkirakan berkontribusi terhadap penurunan emisi sekitar 3.820,9 tCO<sub>2</sub>e per tahun. Secara keseluruhan, proyek diproyeksikan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29.994 tCO<sub>2</sub>e sampai dengan tahun 2030, dengan periode perhitungan 2024–2030. Memasuki aspek teknis, seluruh PLTS Rooftop pada Location 6 sampai Location 11 menggunakan konfigurasi teknologi yang sama, yaitu sistem panel surya tanpa baterai (grid-tied) yang terhubung langsung ke jaringan PLN. Konfigurasi ini dipilih karena lebih ekonomis, sederhana dalam operasional, serta tidak memerlukan sistem penyimpanan energi.

Teknologi utama PLTS disuplai oleh Shizen Energy Inc. sebagai pemasok utama, dengan modul surya yang dipesan dari Tiongkok dan menggunakan teknologi Tier 1 yang telah diakui secara internasional. Pemilihan teknologi tersebut mendukung keandalan sistem serta meningkatkan kelayakan pembiayaan (bankability) proyek. Konfigurasi sistem tanpa baterai memiliki implikasi teknis, yaitu ketika terjadi pemadaman listrik dari jaringan PLN, maka sistem PLTS akan secara otomatis berhenti beroperasi. Penghentian operasi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya aliran balik listrik (reverse power flow) ke jaringan PLN, guna menjaga keselamatan petugas serta memastikan kepatuhan terhadap standar interkoneksi.

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian kinerja, PT Agung Automall sebagai pengelola lokasi secara rutin menyusun dan menyampaikan laporan kinerja PLTS kepada PLN setiap bulan. Laporan tersebut mencakup data produksi listrik, jam operasi, serta informasi teknis lain yang dibutuhkan untuk

kegiatan monitoring dan verifikasi sistem. Untuk memastikan akurasi data dan mutu pemantauan, setiap lokasi proyek dilengkapi dengan power meter Schneider PM5350 untuk pengukuran daya keluaran PLTS serta pyranometer Kipp & Zonen SMP3-A untuk memantau intensitas radiasi matahari. Seluruh data dicatat dan dikirimkan melalui sistem pencatatan dan cloud server sebagai dasar perhitungan emisi dan pelaporan JCM.

Dalam kegiatan kunjungan lapangan, dilakukan peninjauan langsung terhadap instalasi PLTS Rooftop, termasuk tata letak modul surya di atap bangunan, konfigurasi string inverter, serta sistem pengamanan. Peserta juga memperoleh penjelasan teknis dari pengelola terkait skema operasi dan pengamanan sistem.

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

| <b>3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)</b> |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| <b>No</b>   | <b>Rencana Aksi TW IV</b>  | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b><br><br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)  |
| 1.  | Melakukan penelaahan kesesuaian proyek JCM dengan regulasi dan kondisi Indonesia | Terlaksana    | Telah dilaksanakan Monitoring Proyek JCM melalui Kunjungan Lapangan Proyek JCM “Project ID033: 4.2MW Rooftop Solar Power Project to Pharmaceutical Factories, Vehicles Dealers, and Timber Factories pada PLTS Rooftop Alampont Inc di Denpasar Bali pada 20-21 November 2025. |
| 2.  | Monitoring proyek JCM dan AZEC   | Terlaksana    | Monitoring terhadap Nota Kesepahaman proyek kerja sama   |

|    |                                     |            |  |
|----|-------------------------------------|------------|--|
|    |                                     |            | AZEC terus dilakukan. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai implementasi transisi energi, seperti panas bumi, pilot project di sektor pertanian, dan sektor terkait lainnya.    |
| 3. | Koordinasi dengan Stakeholders AZEC | Terlaksana | Koordinasi dengan Penerima Hibah Peninjauan Aspek Substantif dan Hukum perihal Pengaturan Hibah (Grant Arrangement) Komponen 3 Proyek TPPAS Regional Legok Nangka dalam Skema AZEC |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Audiensi kepada Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan, 4 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Teknis Pengaturan Rencana Hibah PLTSa Legok Nangka. 16 Desember 2025
3. *Consultation Meeting* dengan calon *Project Participant* JCM

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan di kantor dan juga melalui media zoom, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp25.490.000.

## 4

### Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Capaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral**

##### **Latar Belakang**

Terwujudnya penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral yang mencakup a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral; b) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra Indonesia; dan c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra Indonesia.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah item survey}}$$

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

##### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 (Baik) atas indeks.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar sebesar Indeks 3,67 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan | Target   | Realisasi | % Kinerja           |
|--|--------|----------|-----------|---------------------|
| IKU-4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral | Indeks | 3 dari 4 | 3         | 100%<br>(Memuaskan) |

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada tahun 2025 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah melakukan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral untuk Semester II dengan nilai indeks rata-rata sebesar 3, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

| <b>4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral</b> |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| No  | Rencana Aksi TW IV  | Status     | Keterangan<br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)  |
| 1.  | Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan III dan IV | Terlaksana | Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan III dan IV dengan rata-rata indeks 3,67 |

## Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Capaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **4.2 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral**

#### **Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Multilateral merupakan persentase pemenuhan bukti dukung atas pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Birokrasi (RB) general di lingkungan Asisten Deputi.

Adapun komponen penilaian dalam mengukur persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi general di lingkungan Asisten Deputi Multilateral yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB general di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral:

$$\% \text{ Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dikaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85% atas Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 20% yang dipilih mengacu kepada tren progress atas cascading dari Program Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang mencapai target yang

telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja           |
|--|------------|--------|-----------|---------------------|
| IKU-4.1<br>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral | Persentase | 85%    | 85%       | 100%<br>(Memuaskan) |

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada tahun 2025 ditargetkan 85%. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah melakukan seluruh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Triwulan IV tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja ekon-GO
2. Pengisian Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Triwulan IV Tahun
3. Optimalisasi Implementasi Srikandi pada Triwulan IV tahun 2025

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

| <b>4.1 Presentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Kerja Sama Ekonomi Multilateral</b> |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| No  | Rencana Aksi TW IV   | Status     | Keterangan<br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)         |
| 1.  | Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja ekon-GO | Terlaksana | Laporan Kinerja Triwulan IV Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah diunggah ke web ekon-go sebagai |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
|    |  |            | bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja   |
| 2. | Penyusunan laporan kinerja Triwulan IV | Terlaksana | Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV  |
| 3. | Optimalisasi implementasi Srikandi     | Terlaksana | Dalam pelaksanaan persuratan dan dokumentasi Keasdepan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah menggunakan dan memanfaatkan Srikandi secara optimal |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Capaian Kegiatan dan Anggaran Asdep Multilateral melalui E-Monev Bappenas setiap bulannya dan Melakukan pengisian capaian Triwulan IV untuk RB Tematik.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah terhambatnya optimalisasi penggunaan SRIKANDI. Pada aplikasi SRIKANDI sering kali sulit diakses atau sulit untuk dilakukan penandatanganan sehingga proses persuratan terhambat.

Berdasarkan kendala-keadala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan memanfaatkan media lain seperti *whatsapp* sebagai media koordinasi dengan para PIC untuk penyampaian surat dan nota dinas kepada pihak terkait serta melakukan *back up* data persuratan secara luring.

Jakarta, 14 Januari 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ferry Ardiyanto', written in a cursive style.

Ferry Ardiyanto